

## **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN**

### ***TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE EDUCATION FUND MANAGEMENT IN SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN***

Oleh: Tomi Viktoria (08518244014), Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, victory1401@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, (2) mengetahui akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, (3) mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan yang berjumlah 10 responden. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan menunjukkan bahwa : (1) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan skor 75,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan, (2) SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan skor 80,6% dalam melaksanakan kebijakan yang akuntabel, (3) pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan tergolong cukup dengan skor 78,6%.

Kata kunci : transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana pendidikan

#### **Abstract**

*This study aims to : (1) determine the transparency of SMK Muhammadiyah Prambanan (2) determine accountability SMK Muhammadiyah Prambanan (3) know that management of education funds SMK Muhammadiyah Prambanan. This study used a descriptive approach. The sample in this study is Headmaster and School Committee SMK Muhammadiyah Prambanan representing 10 responders. This research data collection techniques using questionnaires and interviews. Data processing was done descriptively. Transparency and Accountability research results Management Of Educational Fund SMK Muhammadiyah Prambanan shows that : (1) SMK Muhammadiyah Prambanan included in the category with a score of 75.5% sufficient in implementing transparent policies, (2) SMK Muhammadiyah Prambanan included in the category with a score of 80.6% sufficient in implementing policies accountable, (3) management of education funds SMK Muhammadiyah Prambanan is quite the score of 78.6%.*

*Keywords: transparency, accountability, management of education funds*

## PENDAHULUAN

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah tentang standar pembiayaan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public [1]. Prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut harus mendapatkan penekanan dan perhatian oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan yang ada berjalan dengan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Namun pada kenyataannya, saat ini masih belum semua lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang ditulis dalam Kompas.com bahwa penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah disejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,61 persen orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepada sekolah [2].

Dari data dan berita yang ada pengelolaan dana pendidikan dinilai masih menjadi permasalahan yang besar. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan masih cukup rendah. Selain hal tersebut dikarenakan pihak sekolah dirasa kurang transparan dan akuntabel dalam memberikan data dan informasi yang dikelola kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik [3]. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus mem berikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya sekolah memberikan hak dan kemudahan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dan terkait (*stakeholder*) untuk

memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (*stakeholders*).

Biaya (*cost*) merupakan istilah yang secara umum berkaitan erat dengan administrasi keuangan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang dianggap penting dalam menunjang proses keberlangsungan kegiatan pendidikan. Anggaran penting tersebut terkait dengan kegiatan pendidikan di sekolah seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya selalu membutuhkan biaya dalam proses keberlangsungannya, agar kegiatan-kegiatan tersebut tercapai secara optimal. Biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen [4]. biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar [5].

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari konsep manajemen keuangan

sekolah yang harus direncanakan dan diatur dengan baik dan benar. Perencanaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah dalam menyusun dan merumuskan pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak lepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif [4]. Ketersediaan dan penggunaan dana pendidikan adalah bagian terpenting dalam pengelolaan dana pendidikan. Penggunaan dana pendidikan harus tepat sasaran, sehingga penggunaan dana pendidikan yang ada akan efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan dan pencapaian pendidikan akan terwujud sebagaimana mestinya.

Penyusunan dan perumusan anggaran maupun dana pendidikan di sekolah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan yang ada. Hal tersebut terkait dengan darimana sumber keuangan berasal dan penggunaan keuangan atau pengeluaran keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Sutedjo sebagai berikut: (1) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, (3) Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya, (4) Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan [6].

Prinsip dan tujuan pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya alat ukur dan standarisasi yang mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan. Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, antara lain: (1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, (2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah, (3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan [4]. Alat ukur dan standarisasi yang digunakan sebagai acuan

dalam pengelolaan dana pendidikan sebagai berikut: (1) Biaya pendapatan, (2) Biaya pengeluaran, (3) Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, (4) Anggaran untuk kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir, (5) Biaya operasional untuk guru pada tahun berjalan, (6) Biaya operasional untuk tenaga kependidikan pada tahun berjalan, (7) Alokasi biaya operasional program keahlian di luar pendidik dan tenaga kependidikan, (8) Alokasi biaya kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan program kewirausahaan, (9) Biaya personal yang berasal dari uang sekolah (tanpa keringanan biaya pendidikan), (10) Biaya personal yang bersal dari uang sekolah (dengan keringanan biaya pendidikan), (11) Biaya pendaftaran ulang siswa setiap awal tahun, (12) Biaya subsidi silang meliputi: pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan, pemberian beasiswa maupun bentuk bantuan lainnya, (13) Pungutan biaya personal di samping uang program keahlian, (14) Pengambilan keputusan untuk menetapkan biaya personal melibatkan berbagai pihak, (15) Biaya personal yang berasal dari dana masyarakat tercantum dalam RKS-S/M, (16) Kepemilikan pedoman pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir, (17) Dilaksanakan pembukuan biaya operasional selama empat tahun terakhir, (18) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama empat tahun terakhir [7].

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai [6]. Transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah [7]. Istilah transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya kepada publik. Transparansi akan membawa dampak dan konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pihak yang terkait dengan pendidikan (*stakeholders*). Dengan demikian transparansi tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, (2) Kemudahan akses informasi, (3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan [8].

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Sekolah merupakan pihak yang diberi mandat dalam mengelola pendidikan [6]. Dengan demikian sekolah harus memberikan pertanggung jawaban atas kebijakan dan aturan-aturan yang telah dibuat kepada pihak yang terkait dengan pendidikan (*stakeholders*). Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik [9]. prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan. Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas: (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, (2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, (3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, (4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, (5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, (6) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan

mekanisme pengaduan masyarakat, (7) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil [8].

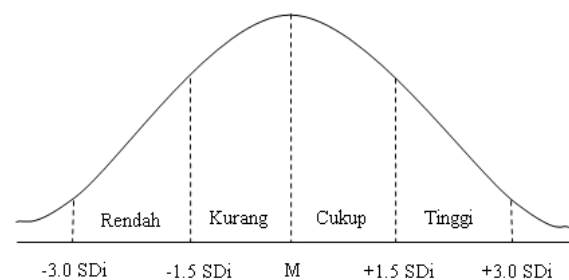
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan. Jenis data penelitian ini adalah data ordinal kemudian membuat kriteria pencapaian data ordinal yang ada, selanjutnya dirubah ke dalam bentuk interval. Pada instrumen angket yang digunakan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu: sangat sesuai (4), cukup sesuai (3), tidak sesuai (2), sangat tidak sesuai (1). Empat pilihan jawaban yang ada tersebut digunakan untuk menentukan adanya gradasi yang akan dirubah ke dalam bentuk interval yang diperoleh dari perhitungan skor minimal dan skor maksimal yang nantinya digunakan untuk mencari standar deviasi ideal dan *mean* ideal. Standar deviasi ideal dan *mean* ideal digunakan untuk menentukan interval persentase pencapaian ke dalam 4 kriteria. Pembagian jarak interval dicari dengan membuat kurva normal yang terbagi menjadi 4 kategori. Pengkategorian dibagi menjadi empat kriteria yaitu tinggi, cukup, kurang, rendah. Pengkategorian tersebut mengacu rumus perhitungan berikut ini.

$$4 \text{ skala} = 6 \text{ Sdi}$$

$$1 \text{ skala} = 6/4 \text{ Sdi} = 1,5 \text{ Sdi}$$

Perhitungan tersebut menjadi acuan dalam pembagian kurva kategori data.



Berdasarkan Kurva Kategori Data kecenderungan variabel diperoleh rumus berikut ini.

No	Rentang Skor (i)	Kategori
1	( $M_i + 1,5 S_{Di}$ ) sampai dengan (ST)	Tinggi
2	( $M_i + 0,0 S_{Di}$ ) sampai dengan ( $M_i + 1,5 S_{Di}$ )	Cukup
3	( $M_i - 1,5 S_{Di}$ ) sampai dengan ( $M_i + 0,0 S_{Di}$ )	Kurang
4	(SR) sampai dengan ( $M_i - 1,5 S_{Di}$ )	Rendah

Keterangan:

- $M_i$  = Rerata/mean ideal  
 $S_{Di}$  = Standar Deviasi Ideal  
 $M_i$  =  $1/2$  ( Skor ideal tertinggi + skor ideal terendah)  
 $S_{di}$  =  $1/6$  ( Skor ideal tertinggi – skor ideal terendah)  
 ST = Skor Tertinggi  
 SR = Skor Terendah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

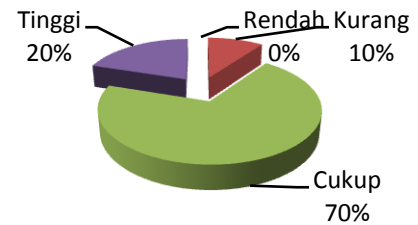
Berdasarkan indikator tentang transparansi yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 10 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Distribusi Kriteria Transparansi

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	1	10.0	10.0	10.0
	Cukup	7	70.0	70.0	80.0
	Tinggi	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 2 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 20% dengan kategori tinggi, 7 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 70% dengan kategori cukup, dan 1 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 10% dengan kategori kurang.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut:



Gambar 1. Persentase Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 30,20. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen transparansi yaitu  $4 \times 10 = 40$ . Dengan demikian nilai transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan adalah  $30,20 : 40 = 0,755$  atau 75,5%.

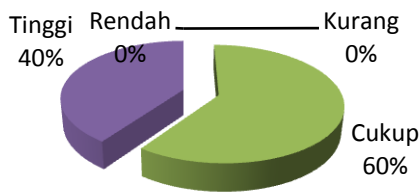
Berdasarkan indikator tentang akuntabilitas yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 12 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Distribusi Kriteria Akuntabilitas

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	6	60.0	60.0	60.0
	tinggi	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 4 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 40% dengan kategori tinggi dan 6 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 60% dengan kategori cukup.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut:



Gambar 2. Persentase Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 38,70. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen akuntabilitas yaitu  $4 \times 12 = 48$ . Dengan demikian nilai akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan adalah  $38,70 : 48 = 0,806$  atau 80,6%.

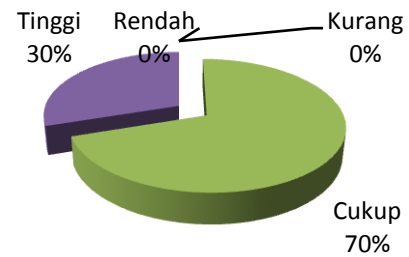
Berdasarkan indikator tentang akuntabilitas yang sudah ditentukan maka selanjutnya dilakukan langkah pengukuran dengan menggunakan 26 butir instrumen dengan 4 pilihan jawaban. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan interval kriteria pencapaian dan distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Distribusi Kriteria Pengelolaan Dana Pendidikan

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	7	70.0	70.0	70.0
	tinggi	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Data Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan terdapat 3 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 30% dengan kategori tinggi dan 7 dari total keseluruhan responden memiliki persentase 70% dengan kategori cukup.

Persentase transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut:



Gambar 3. Persentase Pengelolaan Dana Pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan

Skor rata-rata pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dengan pengumpulan data sebesar 81,80. Langkah untuk identifikasi kecenderungan skor rata-rata dicari berdasarkan skor tertinggi dan jumlah butir instrumen pengelolaan dana pendidikan yaitu  $4 \times 26 = 104$ . Dengan demikian nilai akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan adalah  $81,80 : 104 = 0,786$  atau 78,6%.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 75,5%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup transparan. Hasil perolehan skor tingkat transparansi tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) berbanding lurus dengan hasil wawancara. Hasil perbandingan lurus tersebut dapat dijelaskan karena pihak SMK Muhammadiyah Prambanan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan baik meskipun untuk beberapa hal tidak dapat diberikan secara langsung atau terbuka.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 80,6%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian tingkat transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup akuntabel. Hasil perolehan skor tingkat akuntabilitas tersebut diperkuat

berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Tingkat akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) berbanding lurus dengan hasil wawancara. Hasil perbandingan lurus tersebut dapat dijelaskan karena pihak SMK Muhammadiyah Prambanan selalu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan, diperoleh skor 78,6%. Berdasarkan kriteria persentase pencapaian pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil perolehan skor pengelolaan dana pendidikan tersebut diperkuat berdasarkan hasil temuan yang digali melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan yang diperoleh dari instrumen kuesioner (angket) berbanding lurus dengan hasil wawancara. Hasil perbandingan lurus tersebut dapat dijelaskan karena pihak SMK Muhammadiyah Prambanan selalu menerapkan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan sekolah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Transparansi SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 70%. Hal tersebut menunjukkan prinsip transparansi yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong baik. Dengan demikian SMK Muhammadiyah Prambanan cukup transparan dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan. (2) Akuntabilitas SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 60%. Hal ini menunjukkan prinsip akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah tergolong baik. Dengan demikian SMK Muhammadiyah Prambanan cukup akuntabel dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan.

(3) Pengelolaan dana pendidikan SMK Muhammadiyah Prambanan termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 70%. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan dana pendidikan tergolong baik dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAK-S) yang sudah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Penelitian Bank Dunia. 2010. *Transparansi Dana BOS Rendah*. Diunduh dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/11/09530331/Transparansi-Dana-Bos-Rendah>. Pada tanggal 15 februari 2014-04-25
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mei Hidayati. 2012. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman Tahun 2011*. Yogyakarta. Skripsi Universitas NEgeri Yogyakarta
- Nanang Fattah. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Sutedjo. 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Semarang : Tesis Universitas Diponegoro
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah [BAN-SM] (2009). *Perangkat Akreditasi SMK/MA*. Badan Akreditasi Nasional Sekola/Madrasah
- Loina Lalolo Krina P. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. 2003
- Surya Dharma. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan Nasional 2010